



SOLIDARITY

<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>

Implementasi Program Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Taman Kota Madiun

Exzax Isyabillilah, Fulia Aji Gustaman

exzaxisya99@students.unnes.ac.id, gustaman@mail.unnes.ac.id ☐

Jurusan Sosiologi dan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima:

9 Maret 2023

Disetujui:

9 Maret 2023

Dipublikasikan:

9 Maret 2023

Keywords:

*Empowerment,
Implementation,
Program*

Abstrak

Pembentukan LPMK dilatarbelakangi oleh adanya berbagai potensi sumberdaya yang belum dimanfaatkan secara optimal sebagai upaya pembangunan sumberdaya manusia. Dengan adanya lembaga yang dapat digunakan dalam menampung aspirasi masyarakat pada lingkup terkecil yaitu Kelurahan, maka pembangunan sumberdaya manusia dapat dilakukan secara merata dan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) mengetahui program kerja LPMK dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Taman, Kota Madiun. 2) mengetahui implementasi pelaksanaan program dan fungsi LPMK sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Taman, Kota Madiun. 3) mengetahui efektivitas pelaksanaan program kerja LPMK terhadap kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Taman, Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Lokasi penelitian di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Program kerja yang telah dibuat dibagi menjadi tiga bidang yaitu bidang ekonomi dan pembangunan, bidang pendidikan pelatihan sosial masyarakat dan bidang sosial budaya, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. 2) Implementasi dan pelaksanaan program dan fungsi LPMK dilaksanakan dengan melaksanakan pemberdayaan masyarakat namun dalam melaksanakan program kerja terdapat beberapa kendala yang dialami. 3) efektivitas pelaksanaan program kerja LPMK kurang dapat dilaksanakan secara optimal karena terdapat beberapa kendala yang dialami dan juga terdapat beberapa program kerja yang dirasakan kurang oleh masyarakat.

Abstract

The background of the LPMK establishment was the unoptimized various potential human resources. By having an institution for accommodating community aspirations at the smallest scope, namely Kelurahan, human resource development can be carried out evenly and community welfare can be realized. The aims of this research are: 1) to find out the work program of LPMK to improve the welfare of the community in Taman Kelurahan Madiun City. 2) to explore the implementation of the program and functions of the LPMK as an effort to improve people's welfare in Taman Kelurahan Madiun City. 3) to find out the effectiveness of the implementation of the LPMK work program on the welfare of the community in Taman Village, Madiun City. This used a qualitative method. The research location was in Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun. The results of this study indicated that: 1) The work programs that have been set were divided into three fields, namely the economic and development fields, the social training education sector, and the socio-cultural, environmental, and community empowerment fields. 2) The implementation of the programs and functions of the LPMK were carrying out community empowerment yet it experienced several obstacles. 3) the effectiveness of LPMK work program implementation was unoptimized because of several obstacles and less work of some works programs.

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C6 Lantai 1 FIS Unnes

Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

E-mail: unnnessosant@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan di Indonesia dalam wilayah perkotaan ditandai dengan meningkatnya program industrialisasi yang menjamur di wilayah perkotaan. Sejak 1990-an Indonesia dikelompokan sebagai salah satu negara di Asia Timur sebagai Newly Industrializing Economis atau Negara Industri Baru (Kustanto et al. 2012). Tentunya hal tersebut secara perlahan membawa dampak tersendiri bagi masyarakat, masyarakat yang berada di luar lingkaran industrialisasi lama kelamaan akan tersingkirkan, termarginalisasi bahkan tidak jarang jatuh ke dalam jurang kemiskinan karena tidak mampu bersaing dalam industrialisasi perkotaan sehingga tersisihkan dalam dunia industri. Maraknya urbanisasi yang tidak terkendali rentan menimbulkan masalah sosial seperti tersisihkannya masyarakat lokal terhadap penyerapan tenaga kerja karena keterbatasan sumber daya manusia (Atthahara and Rizki 2019) . Permasalahan utama yang dihadapi oleh negara negara berkembang termasuk Indonesia adalah dalam pemanfaatan sumber daya manusia yang sangat melimpah namun tidak terlatih, sehingga seharusnya jika penduduk yang besar tidak hanya menjadi beban terhadap pembangunan tetapi dapat menjadi modal pembangunan. Seringkali pembangunan hanya menggantungkan dan menyasar pada proses industrialisasi saja padahal tidak semua masyarakat dapat terserap dalam proses industri tersebut.

Kota Madiun merupakan kota yang berada di Jawa Timur yang menjadi pusat pada wilayah eks-karesidenan Madiun. Kota yang mengidentikkan diri dengan julukan Kota Gadis yang memiliki akronim Perdagangan dan Industri membuat Kota Madiun menjadi kota yang memfokuskan perekonomian pada sektor industri. Berdirinya pabrik gula serta pabrik kereta api terbesar di Indonesia membuat kota ini menjadikan industri dan perdagangan sebagai salah satu komoditi utama dalam proses perekonomian. Karena tidak didukungnya wilayah geografis yang dapat digunakan sebagai daerah wisata alam, sejak dahulu pemerintah kota hanya memfokuskan pembangunan terhadap daerah daerah pusat industri. Keterbatasan daerah wisata membuat pemerintah pada saat ini gencar mendorong wisata berbasis UMKM sehingga masyarakat perlu dilibatkan dalam pengembangan potensi agar lebih maksimal.

Pembangunan kota yang hanya menyasar dibidang fisik tentunya mengabaikan potensi sumber daya manusia yang ada sehingga banyak masyarakatnya yang justru tidak terserap oleh dunia kerja di bidang industrialisasi. Terbatasnya daya serap sumber daya manusia dalam industrialisasi kota mengakibatkan sebagian masyarakat tersisih karena sumber daya yang mereka miliki dianggap tidak memenuhi kebutuhan industrialisasi. Terbatasnya lapangan pekerjaan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan membuat pengembangan sumber daya manusia kurang berkembang. Masyarakat yang tersisih dalam lapangan pekerjaan tidak jarang meninggalkan kampung halaman untuk mencari pekerjaan di kota kota lain yang memiliki peluang mereka memenuhi kebutuhan hidup yaitu dengan bekerja.

Ryan Anggria (2017) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Kelurahan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di tiap Kelurahan. Melalui beberapa kegiatan antara lain yaitu peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan ekonomi kelurahan serta kegiatan lain yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan nilai nilai produktivas. Susan (2012) menyampaikan konsep pengembangan SDM merupakan suatu pendekatan strategis dan menyeluruh dalam mengelola orang, budaya tempat kerja serta lingkungan untuk secara efektif berkontribusi dan produktif ke tujuan dan sasaran organisasi.

Dalam program pemerintah saat ini mengikutsertakan masyarakat pada proses pembangunan salah satunya dibentuklah program LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan wadah yang dibentuk dari prakarsa masyarakat sebagai bagian dari mitra lurah dalam menampung segala aspirasi yang masuk serta proses dalam mewujudkan aspirasi tersebut dalam bidang pembangunan. Menurut Perda Kota Madiun No. 4 Tahun 2017 program LPMK

memiliki tugas yaitu menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Proses pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan harapan agar masyarakat yang berada di tiap tiap kelurahan dapat lebih leluasa dalam proses mengolah keterampilan serta mengembangkan potensi potensi lokal yang dimiliki karena setiap kelurahan nantinya memiliki potensi yang berbeda sehingga masyarakat yang berada di setiap kelurahan dapat diberdayakan dengan program tersebut. Lembaga pemberdayaan masyarakat yang ada di desa maupun kelurahan masih belum optimal. Hal tersebut terjadi karena kurangnya kapasitas sumber daya maupun kemampuan organisasi dalam mengembangkan potensi yang ada di daerah. Kualitas manusia sangat dibutuhkan agar sesuai dengan adanya tuntutan pengembangan, sumber daya manusia berkualitas dapat membantu kelancaran suatu pengembangan, sedangkan sumber daya manusia yang rendah dapat menjadi hambatan dalam pengembangan (Dewanti dan Gustaman, 2021). Dalam proses pemberdayaan lembaga harusnya memiliki pengetahuan mengenai pemberdayaan, kebutuhan masyarakat maupun inovasi sehingga program program yang digagas melalui aspirasi masyarakat dapat tepat sasaran.

Dalam pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektifitas peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) dalam merencanakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta melihat bagaimana partisipasi masyarakat Kelurahan Taman. Seperti penelitian yang disusun oleh Cahyana Putra Abdullah (2021) yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Asesa Kabupaten Nagakeo” Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan kurang efektif dalam pelaksanaannya dikarenakan proses dalam penyampaian aspirasi mengenai keluhan masyarakat sangat lama yaitu hanya dilakukan satu kali dalam setahun sehingga proses dalam tindak lanjut keluhan yang ada di masyarakat kurang dapat diakomodir dengan cepat oleh pihak LPM. Selain itu proses dalam rencana pembangunan fisik yang akan dilaksanakan tidak diserahkan oleh pihak yang berwenang melainkan hanya diserahkan kepada pihak ketiga sehingga proses dalam pelaksanaannya dinilai kurang optimal. Hal tersebut juga dirasa sangat kurang efektif mengenai tugas maupun fungsi LPMK sebagai bagian dari pembangunan karena proyek proyek pembangunan yang seharusnya dilaksanakan bersama sama hanya dilimpahkan terhadap pihak lain. selain itu dalam pelaksanaan pembangunannya mengenai tindak lanjut dari aspirasi warga pihak LPMK tidak sepenuhnya mengawasi maupun melaksanakan pemantauan yang melibatkan petugas petugas LPMK yang seharusnya menjadi kewenangannya.

Penelitian tentang efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga pernah dilakukan oleh Fauza Amelia (2015) yang berjudul “Efektivitas Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru” dalam penelitian ini membahas mengenai efektivitas fungsi LPMK dalam pemberdayaan masyarakat yang menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan fungsi LPMK dalam pembangunan sudah dilaksanakan dengan baik dengan tercapainya beberapa indikator dalam keefektivitasan yaitu upaya dalam menyesuaikan diri ditandai dengan penerimaan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Selain itu dalam produktivitas kerja juga sudah berjalan dengan baik ditandai dengan terlaksananya musrenbang dan direalisasikan. Selain itu juga terdapat beberapa kendala yaitu masalah yang diantaranya adalah partisipasi masyarakat yang kurang dalam upaya urun rembug menyampaikan ide atau usulan masih dianggap pasif. Serta sumber daya manusia yang kurang dikarenakan kesibukan masing masing dalam anggota LPMK sehingga kinerjanya tidak maksimal. Dalam pelaksanaannya lebih dominan dilaksanakan oleh Ketua RT saja, sementara pengurus yang lain hanya mengikuti instruksi dari Ketua LPMK.

Penelitian yang lain mengenai efektivitas lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan juga pernah dilakukan oleh Rini Mustika Sari (2015) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki” dalam penelitian ini membahas efektivitas program yang menggunakan indikator tujuan, partisipasi dan sumber daya manusia dalam mengukur tingkat keefektivitasan suatu lembaga. Dalam penelitian ini juga membahas mengenai kemampuan LPMK dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan dimana LPMK cenderung menunggu laporan dari masyarakat dalam menanggapi suatu hal yang terjadi. Selain itu produktivitas LPMK juga mempengaruhi efektivitas program tersebut berjalan, produktivitas LPMK ditandai dengan pencapaian tujuan yang dilakukan yang sudah terlaksana dengan baik. Selain dalam pelaksanaan teknis, sumber daya manusia (SDM) juga mempengaruhi dalam pelaksanaan program yang dilaksanakan, dalam penelitian ini sumber daya manusia dirasakan kurang memahami tugas dan peran yang diambil sehingga dalam pelaksanaannya mengalami kendala akibat kurang profesionalitas sumber daya manusia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain didasarkan terhadap teori yang dipilih oleh peneliti dalam menganalisis permasalahan yaitu dengan konsep efektivitas, konsep tersebut digunakan untuk menjelaskan efektivitas pelaksanaan program dari skema skema yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain yaitu menggunakan indikator efektivitas yaitu pencapaian tujuan, adaptasi dan integrasi. Selain itu, dalam mengkaji pelaksanaan program pemberdayaan digunakan konsep pendekatan pembangunan *bottom-up*. Perbedaan penelitian ini juga terdapat pada fokus penelitian yaitu menitikberatkan kepada efektivitas mekanisme pelaksanaan program kerja yang dijalankan oleh LPMK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam memahami permasalahan yang diteliti melalui teknik penelitian kualitatif seperti observasi dan wawancara secara mendalam dan dokumentasi. Kemudian, data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif dimana dalam pemaparannya dibutuhkan penelitian yang mendalam mengenai program kerja (LPMK) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, pelaksanaan program kerja, sampai dengan pemaparan efektivitas program kerja LPMK terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di wilayah Kelurahan Taman Kota Madiun. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kelurahan Taman, Kota Madiun yang digunakan dalam proses pengambilan data. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yang meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yang ada didalam penelitian ini terdiri dari informan utama dan informan pendukung. Informan utama yaitu anggota pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) yang meliputi Ketua LPMK dan Penanggung Jawab LPMK. Sedangkan informan pendukung yaitu masyarakat yang berada di lingkungan Kelurahan Taman, Kota Madiun. Data sekunder merupakan data yang berguna dalam mendukung adanya data primer. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu sumber data literatur, hasil rekaman dan wawancara, dokumen data dari Kelurahan Taman, serta dokumen foto. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu adalah observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi maupun literatur terhadap bukti fisik yang ada di tempat penelitian. Validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi data dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kelurahan Taman, Kota Madiun

Kelurahan Taman merupakan Kelurahan yang memiliki jumlah penduduk menurut data pada tahun 2021 yang mencapai 13.287 jiwa. Kelurahan Taman terletak di bagian paling selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Madiun. Kelurahan Taman terletak di bagian paling selatan berbatasan dengan wilayah Kabupaten Madiun. Jumlah penduduk merupakan aspek yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bertambahnya jumlah penduduk yang diikuti dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia, hal ini akan menjadikan potensi daerah dalam upaya pembangunan. Sebaliknya jika dalam peningkatan sumber daya manusia tidak diikuti dengan peningkatan kualitas sumber daya yang baik, maka akan menjadi beban dalam pembangunan.

Profil Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Taman

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Taman merupakan salah satu organisasi pendamping di Kelurahan yang memiliki peran aktif dalam kegiatan pembinaan, pelaksanaan kegiatan fungsional, maupun pelaksanaan suatu program kerja. Pembentukan LPMK di Kelurahan memiliki fungsi sebagai wadah yang dibentuk dari prakarsa masyarakat sebagai mitra Kelurahan dalam menampung segala aspirasi dan mewujudkan aspirasi aspirasi sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan wilayah dengan lingkup terkecil di masyarakat. Dalam hal ini LPMK bergerak sebagai fasilitator dalam mendampingi masyarakat dalam perencanaan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) merupakan organisasi yang berdiri berkedudukan pada lingkup Kelurahan. Dalam menjalankan tugas tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan memiliki fungsi yang termuat dalam Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Kemasyarakatan yang menyebutkan terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam peraturan tersebut dikembangkan dalam Perda Kota Madiun Nomor 4 Tahun 2017 pasal 3.

Program Kerja LPMK di Kelurahan Taman

Pelaksanaan tugas dalam menyusun rencana pembangunan, LPMK memiliki fungsi sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Kelurahan Taman memiliki banyak potensi yang ada pada masyarakatnya mulai dari industri kreatif, produk UMKM, maupun produk perdagangan dan jasa serta sumber daya manusia yang melimpah.

Potensi yang ada di wilayah Kelurahan Taman ini tidak dibarengi dengan adanya perhatian dari pemerintah dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan potensi maupun pengembangan sumber daya manusia. Pembentukan perencanaan program yang dibuat oleh LPMK didasarkan terhadap potensi dan kebutuhan masyarakat yang diambil pada saat dilaksanakannya Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) antara LPMK dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Taman.

Adapun program kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Taman dijelaskan sebagai berikut.

Ekonomi dan Pembangunan

- | | |
|-----------------------|--|
| a. Bidang Ekonomi | <ol style="list-style-type: none">1. Memberdayakan lembaga sosial ekonomi atau koperasi yang ada di wilayah Kelurahan Taman2. Memberdayakan dan memfasilitasi kegiatan sosial berupa pameran, pasar malam, pusat kuliner, kios-kios di wilayah Kelurahan Taman dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak lain terkait3. Melakukan pengembangan, menggali potensi serta menginventarisir potensi ekonomi yang berada di wilayah Kelurahan Taman supaya lebih maju dan dapat berguna bagi masyarakat banyak khususnya di wilayah Kelurahan Taman |
| b. Bidang Pembangunan | <ol style="list-style-type: none">1. Membantu merealisasikan pembangunan fasilitas publik untuk kepentingan masyarakat di Kelurahan Taman.2. Membantu koordinasi dengan lembaga lembaga dalam proses realisasi pembangunan di wilayah Kelurahan Taman. |
-

Pendidikan, Pelatihan Sosial Masyarakat dan Kepemudaan

- | | |
|---------------------------------------|--|
| a. Bidang Pendidikan | <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan bantuan terhadap program kesetaraan pendidikan bagi warga yang mengalami putus sekolah (Kejar Paket A,B,C) |
| b. Bidang Pelatihan Sosial Masyarakat | <ol style="list-style-type: none">1. Melakukan pelatihan terhadap karang taruna, kader PKK, kader kepemudaan, dan organisasi organisasi masyarakat yang membutuhkan diklat/pelatihan yang terdapat di wilayah Kelurahan Taman.2. Melakukan workshop kerja (Salon, sablon, perbengkelan, komputer, seni, musik dan lain lain) sesuai kompetensi dan potensi warga. |
| c. Bidang Kepemudaan | <ol style="list-style-type: none">1. Membantu usaha pemerintah dalam menanggulangi dan mencegah kenakalan remaja di wilayah lingkungan Taman.2. Melakukan pelibatan pemuda dalam pembangunan dan penciptaan |
-

kemajuan wilayah	
Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat	
a. Bidang Sosial Budaya	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan giat gotong royong di dalam masyarakat2. Melaksanakan giat sosial berupa kesehatan : Posyandu, Komunikasi Lansia
b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan program pemberdayaan sebagai pemicu usaha ekonomi produktif di lingkungan Kelurahan Taman.2. Memberikan pinjaman modal bagi masyarakat yang kurang mampu yang berpotensi.3. Melaksanakan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan di wilayah Kelurahan Taman.

Implementasi Program LPMK

Pelaksanaan Fungsi LPMK

Dalam rangka melaksanakan program LPMK, tentunya harus dipahami terlebih dahulu beberapa fungsi LPMK sebagai organisasi pelaksana program terhadap masyarakat. Dengan adanya fungsi LPMK, diharapkan implementasi program sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam program LPMK pada masyarakat. Adanya fungsi dari LPMK juga merupakan kegiatan dalam mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perencanaan program yang akan dibuat. Implementasi fungsi yang penulis maksudkan adalah yaitu fungsi LPMK yang didasarkan terhadap Pasal 3 ayat 3 Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 mengenai pedoman penataan lembaga kemasyarakatan, diantara lain yaitu :

- a. Penyaluran Aspirasi
- b. Peningkatan Kualitas dan Percepatan Pelayanan Pemerintah Kepada Masyarakat.
- c. Penumbuhkembangan dan Penggerak Swadaya Gotong Royong Masyarakat
- d. Penggali, Pendayagunaan dan Pengembangan Potensi Sumber Daya Serta Keserasian Lingkungan Hidup
- e. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan

Pelaksanaan Program Kerja LPMK Kelurahan Taman

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai pelaksanaan program kerja yang dibuat oleh LPMK. Program kerja yang dilaksanakan di Kelurahan Taman terdapat program kerja pada masing masing bidang yang dilaksanakan diantaranya sebagai berikut.

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pelaksanaan pada bidang ekonomi terdapat program kerja yang masih belum mampu direalisasikan yaitu pada permasalahan memfasilitasi masyarakat terhadap adanya kebutuhan untuk menyediakan fasilitas kios, pusat kuliner, pameran yang digunakan masyarakat sebagai pasar dalam upaya mewadahi potensi usaha masyarakat di bidang ekonomi. Pada pelaksanaannya LPMK masih terkendala adanya bantuan dana modal yang dimiliki dalam mewujudkan program kerja tersebut. Dalam proses pemberdayaan ekonomi melalui koperasi tugas LPMK hanyalah mengaktifkan kegiatan masyarakat agar tetap berkaitan terhadap koperasi dalam kegiatan perekonomian sehingga dapat mendapatkan harga barang yang bersaing dan lebih menguntungkan masyarakat. Program kerja pada bidang pengembangan,

menggali potensi dan menginventarisir potensi ekonomi oleh LPMK pada saat ini hanya dilaksanakan dengan melakukan pencatatan kepada masyarakat yang dianggap memiliki potensi, namun belum melaksanakan secara khusus pemberdayaan kepada masyarakat tersebut.

Pada program yang lain yaitu program pembangunan, kedua program tersebut sudah dilaksanakan oleh LPMK. Pelaksanaan program kerja tersebut diwujudkannya melalui perencanaan program kerja dalam upaya merealiasasikan pembangunan kepada masyarakat, pelaksanaan program kerja dilaksanakan dengan memberikan usulan usulan kepada Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di Kelurahan Taman. Usulan tersebut didapatkan oleh LPMK dalam pelaksanaan fungsi sebagai penyerap aspirasi masyarakat. Dari proses penyerapan aspirasi tersebut kemudian diputuskan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Bidang Pendidikan, Pelatihan Sosial Masyarakat, dan Kepemudaan

Pelaksanaan program kerja pada bidang pendidikan, pelatihan sosial masyarakat dan kepemudaan sebagian besar sudah dilaksanakan dengan baik oleh LPMK tetapi juga terdapat beberapa program yang masih belum mampu dilaksanakan oleh LPMK terkait kurangnya sumber daya masyarakat dalam pelaksanaan program. Secara keseluruhan proses pelaksanaan program kerja pada bidang tersebut sudah seluruhnya dilaksanakan oleh LPMK, tetapi dalam pelaksanaan program kerja LPMK kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dalam pelaksanaan program juga sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan program yang dijalankan. Adanya kekurangan sumber daya membuat pelaksanaan program kerja yang dijalankan menjadi kurang maksimal karena belum secara sepenuhnya program-program tersebut dapat dilaksanakan seluruhnya.

Pelaksanaan program bantuan Kejar Paket sampai saat ini LPMK belum mendapatkan laporan terkait masyarakat yang belum mendapatkan akses pendidikan. Pada pelaksanaan program kerja di bidang pendidikan LPMK berperan dalam upaya pemberantasan buta huruf dan bantuan terhadap masyarakat yang mengalami hambatan terhadap akses pendidikan. Dalam program kerja yang telah dibuat salah satunya dengan memberikan bantuan terhadap masyarakat dalam menyelesaikan dan menyetarakan pendidikan akibat putus sekolah dengan memberikan bantuan dalam mengakses Kejar Paket. Kejar paket merupakan program pendidikan bagi masyarakat yang mengalami putus sekolah yang resmi dikelola dan terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaan program kerja LPMK mewadahi masyarakat dalam mendapatkan bantuan pendidikan, dengan hal tersebut diharapkan masyarakat mampu mendapatkan program kesetaraan terhadap pendidikan dengan mendapat ijazah sesuai dengan program pendidikan yang diambil.

Pada bidang pelatihan sosial masyarakat program kerja yang telah dilaksanakan LPMK yaitu pada program pelatihan pelatihan kader lingkungan di Kelurahan Taman. Abu Bakar (2013) pendidikan merupakan usaha sadar, sistematis dan terencana yang bertujuan membentuk manusia sesuai dengan karakter masyarakat. Dalam program kerja ini pelatihan pelatihan yang dilaksanakan bersifat pelatihan pelatihan terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Pelatihan yang dilaksanakan bekerja sama dengan kader kader masyarakat seperti karang taruna, kader PKK, kader kepemudaan serta organisasi lain yang ada di masyarakat. Adanya pelatihan yang dilaksanakan membuat masyarakat turut aktif dalam kegiatan kegiatan sosial di masyarakat, dari program pelatihan tersebut di dalam masyarakat mulai terbentuk kegiatan kegiatan yang mulai dijalankan sendiri oleh masyarakat seperti contohnya Posyandu dan Forum Komunikasi Lansia. Program posyandu dan forum komunikasi lansia yang terbentuk dijalankan secara mandiri oleh masyarakat di Kelurahan Taman, acara dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh masyarakat sekitar. Laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut dicatat dan diberikan kepada puskesmas sebagai data kesehatan masyarakat sekitar dan pengontrol kegiatan yang telah dilaksanakan. Tidak jarang pada beberapa waktu perwakilan puskesmas juga hadir memberikan edukasi

maupun bantuan tenaga kesehatan terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat di Kelurahan Taman.

Dalam pelaksanaan program di bidang pelatihan ini juga masih terdapat beberapa program yang belum mampu terlaksana oleh LPMK yaitu pada pelatihan salon dan kegiatan kesenian. Kurangnya anggota dan keterbatasan keahlian yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program tersebut juga mempengaruhi implementasi pelaksanaan dari serangkaian rencana program yang telah dibuat oleh LPMK.

Pada program kepemudaan ini tugas LPMK berkoordinasi dengan perwakilan-perwakilan RT yang ada di lingkungan Kelurahan Taman. Pada pelaksanaannya program kepemudaan merupakan program yang bertujuan untuk mengatur kamtibmas yang ada di Kelurahan Taman. Dalam pelaksanaannya LPMK bekerja sama dengan perwakilan di tiap RT dalam menjaga situasi dan kondisi dan bertanggung jawab terhadap keamanan dan kedamaian di lingkungan yang mereka tempati. Tujuan utama dalam program ini adalah membantu aparat keamanan maupun pendukung adanya program pemerintah dalam menanggulangi kenakalan remaja, budaya mabuk mabukan dan penyebaran obat-obatan terlarang kepada generasi muda.

Bidang Sosial Budaya, Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pada pelaksanaan program kerja di bidang sosial budaya, lingkungan dan pemberdayaan masyarakat terdapat program kerja yang belum mampu dilaksanakan secara keseluruhan oleh LPMK. Pada bidang ini terdapat program kerja yang belum mampu dilaksanakan karena terdapat kendala dalam upaya pelaksanaan sehingga program kerja belum dapat dilaksanakan.

Pelaksanaan program kerja pada bidang sosial budaya sudah berhasil dilaksanakan seluruhnya, yaitu pada program bimbingan dan penyuluhan sudah dilaksanakan oleh LPMK terhadap masyarakat maupun perwakilan-perwakilan kader kader di tingkat kelurahan masing-masing. Pada program giat gotong royong LPMK juga sudah melaksanakan acara giat gotong royong meskipun kegiatan tidak selalu dilaksanakan secara rutin oleh LPMK. Pada program giat sosial kesehatan LPMK telah melaksanakan program kerja tersebut melalui program bimbingan dan penyuluhan yang diberikan sehingga kemudian dapat terbentuk kegiatan sosial masyarakat misalnya Posyandu dan Forum Komunikasi Lansia yang dibentuk dan seluruh anggotanya merupakan masyarakat sekitar. Sedangkan program penanggulangan masalah sosial dan kegiatan pelayanan sosial dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat.

Program kerja pada bidang lingkungan dilaksanakan dengan perawatan maupun pembangunan yang dilaksanakan sebagai bentuk perawatan terhadap fasilitas masyarakat. Program di bidang lingkungan ini LPMK dibantu oleh Kelurahan dan mendapat bantuan dari pemerintah tingkat kota dalam pelaksanaannya misalnya pemugaran selokan, perbaikan fasilitas jalan maupun peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Taman.

Pelaksanaan program kerja pada bidang pemberdayaan menjadikan pemberdayaan sebagai fokus utama. Program pemberdayaan diwujudkan dalam program pelatihan-pelatihan seperti contoh yaitu pelatihan memasak, pelatihan membatik, pelatihan membuat kompos, dan pemberdayaan lapak UMKM dengan produk kue yang dapat digunakan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Secara teori sebagai salah satu strategi dalam mengembangkan suatu usaha atau bisnis adalah dengan meningkatkan kuantitas maupun kualitas terhadap produk (Nugraha et al., 2018). Dengan adanya pelatihan tersebut diharapkan masyarakat akan memiliki keahlian yang dapat digunakan sebagai salah satu skill yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha. Dengan adanya pemberdayaan, hal tersebut tentunya juga akan mempengaruhi kualitas produk maupun keahlian yang dimiliki masyarakat dalam mengembangkan modal usaha yang dijalankan

Efektivitas Program LPMK

Integrasi LPMK Dalam Melaksanakan Program

Menurut Duncan dalam Steers (1985) dalam bukunya “Efektivitas Organisasi” mengatakan bahwa dalam mengukur efektivitas terdapat tiga aspek yang penting yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Aspek integrasi yang dimaksud yaitu digunakan sebagai pengukuran terhadap kemampuan suatu organisasi dalam mengadakan sosialisasi, pengembangan komunikasi terhadap organisasi yang lain, dalam hal ini integrasi berarti adanya proses sosialisasi antara organisasi satu dengan yang lain.

Proses integrasi yang diamati dilihat dari pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh LPMK di Kelurahan Taman termasuk didalamnya berupa mekanisme perencanaan program, sosialisasi kepada masyarakat, musyawarah, kegiatan bekerja sama dengan unsur unsur masyarakat maupun lembaga yang lain, sampai dengan pelaksanaan program kerja yang digunakan sebagai penunjang keberhasilan dan pendekatan yang baik kepada masyarakat agar ketercapaian program dapat terlaksana dan sesuai tujuan yang diharapkan.

Proses sosialisasi perencanaan program sampai dalam proses pelaksanaan program kerja LPMK kurang bekerja sama dan berkoordinasi dengan unsur masyarakat yang ada dalam pelaksanaan program kerja. Proses sosialisasi mengenai program kerja dan pelaksanaan program kerja belum dilaksanakan kepada masyarakat sehingga partisipasi maupun antusias terhadap penyelenggaraan program kerja kurang diketahui masyarakat karena kurangnya pengetahuan terhadap program kerja tersebut. Selain itu adanya integrasi dari lembaga sebagai organisasi yang melaksanakan pelaksanaan program dengan pihak pihak pelaksana maupun masyarakat dalam melaksanakan program kerja LPMK belum dilakukan secara maksimal karena belum dapat melakukan pembagian tugas maupun kerja sama di lingkungan pelaksanaannya, proses sosialisasi yang dilakukan oleh LPMK kepada masyarakat juga belum berjalan baik, koordinasi hanya dilakukan dengan beberapa perwakilan perwakilan dari masyarakat.

Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan keinginan atau hasil yang hendak diperoleh dalam suatu pelaksanaan kegiatan. LPMK merupakan lembaga yang dibentuk dari masyarakat yang memiliki tujuan utama dalam programnya yaitu sebagai bentuk peningkatan pemerataan pembangunan sumber daya, peningkatan partisipasi masyarakat dan menstimulus kemandirian masyarakat. Pencapaian tujuan dari program kerja LPMK belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan dengan baik. Dalam pelaksanaan program kerja dirasa masih kurang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat.

Pada program kerja LPMK sebenarnya sudah dilaksanakan beberapa program kerja yaitu pembangunan dan pelatihan tetapi terdapat program kegiatan yang lainnya yang belum mampu dilaksanakan oleh LPMK karena terkendala oleh operasional dana maupun terkendala oleh perizinan. Karena keterbatasan dana yang terjadi membuat beberapa program kerja sulit untuk dilaksanakan dengan baik oleh LPMK. Perencanaan program yang telah diajukan oleh LPMK tidak dibarengi oleh dukungan dana dari Kelurahan yang membuat program kerja yang telah dibuat tidak sedikitnya tertunda atau sulit untuk dilaksanakan.

Adaptasi LPMK Dalam Pelaksanaan Program

Adaptasi LPMK dalam pelaksanaan program dilihat dari kemampuan lembaga dalam menyusun perencanaan program sesuai dengan kapasitas maupun kemampuan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir adanya hambatan ataupun kendala sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan mengenai adaptasi penyesuaian lembaga terhadap lingkungan dari pelaksanaan program kerja LPMK di Kelurahan Taman dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala yang dihadapi oleh LPMK dalam upaya merealisasikan program kerja. Kendala utama dalam pelaksanaan program kerja adalah mengenai dukungan dana yang diberikan

kepada LPMK dalam proses pelaksanaan program kerja. Dukungan dana yang terbatas juga turut membatasi gerak dari LPMK dalam melaksanakan program. Namun juga terdapat beberapa program yang sudah berhasil dilaksanakan kepada masyarakat.

Permasalahan utama dalam proses pelaksanaan program kerja LPMK selama ini yaitu keterbatasan dana yang dimiliki sehingga belum semua program kerja yang sudah dirancang dapat dengan mudah dilaksanakan. Menurut Perda no 4 tahun 2017 mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Taman pasal 18 yang mengatur mengenai pendanaan dan fasilitas, menyebutkan bahwa pendanaan program kerja hanya didasarkan terhadap bantuan pemerintah daerah melalui Kelurahan dan bantuan lain yang dianggap sah dan tidak mengikat. Dalam anggaran Kelurahan dana yang diberikan Kelurahan kepada LPMK masih terbatas. Dalam beberapa pelaksanaan program kerja sudah dapat dilaksanakan tetapi masih terdapat rencana pada program kerja yang belum dapat dilaksanakan karena belum adanya dana yang diberikan maupun persetujuan dari pihak pihak pendukung seperti pemerintah. Upaya yang dilakukan oleh pihak LPMK dengan Kelurahan yaitu dengan melakukan musyawarah terhadap rancangan program yang belum dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan solusi maupun pengganti rencana program yang baru kepada masyarakat.

Pembahasan

Menurut Duncan dalam Steers (1985) mengatakan bahwa efektivitas dapat diukur dari pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Menurut Mardiasmo (2004) efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, apabila organisasi tersebut berhasil mencapai tujuan maka organisasi tersebut dapat dikatakan berhasil. Pencapaian Tujuan dari penelitian yang telah dilaksanakan yaitu didasarkan terhadap proses pelaksanaan program kerja LPMK kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program LPMK yang telah dilaksanakan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif. Beberapa program kerja yang dilaksanakan cenderung hanya didasarkan sebagai penunaian tanggung jawab tanpa adanya keseriusan dalam mendapatkan hasil yang maksimal dari tiap program kerja yang dilaksanakan. Dari pelaksanaan program tersebut juga kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal tersebut dibuktikan oleh wawancara dari Bapak Sugeng yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program kerja LPMK hanya dilakukan sebanyak satu kali dan tidak adanya tindaklanjut maupun program berkelanjutan yang direncanakan oleh LPMK membuat manfaat yang didapatkan oleh masyarakat kurang maksimal. Ditambah lagi dengan terkendalinya beberapa pelaksanaan dari program kerja juga menghambat realisasi program yang telah dibuat oleh LPMK. Tujuan utama dibentuknya LPMK yaitu sebagai lembaga yang membantu Lurah dalam meningkatkan pemerataan pembangunan sumber daya, penggerak partisipasi masyarakat dan kemandirian. Dalam hal ini pelaksanaan program kerja LPMK sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat kurang dilaksanakan secara maksimal. Pelaksanaan program kerja yang hanya dilaksanakan satu kali dan tidak memiliki program berkelanjutan secara konsisten sebagai upaya mensukseskan pelaksanaan program kerja sebagai bentuk pembangunan sumber daya, penggerak partisipasi dan kemandirian. Sehingga hasil yang dirasakan dan didapatkan oleh masyarakat kurang maksimal karena belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu adanya kendala dalam modal pendanaan dalam pelaksanaan program kerja juga mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program kerja dalam pencapaian tujuan.

Kedua yaitu Adaptasi. Adaptasi merupakan penyesuaian dari organisasi terhadap sebuah sistem sehingga mampu beradaptasi dengan situasi di lingkungan. Adaptasi yang diamati dalam pelaksanaan LPMK dilihat dari proses penyesuaian pembuatan program LPMK terhadap masyarakat. Adaptasi tersebut juga melihat kemampuan LPMK dalam melaksanakan program kerja. Dari hasil penelitian terdapat program kerja yang belum dapat

terlaksana dengan baik, hal tersebut dikarenakan kendala dalam proses pelaksanaannya seperti kurangnya dana yang dimiliki dalam pelaksanaan maupun sumber daya manusia dalam proses pelaksanaan yang kurang mendukung. Adanya penyesuaian pembuatan program kerja terhadap potensi masyarakat yang dilaksanakan oleh LPMK dalam menyusun program kerja disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Peningkatan kreatifitas dan kemampuan masyarakat melalui pelatihan pemberdayaan membuat masyarakat menjadi lebih mandiri serta memiliki pengetahuan dalam pelaksanaan kegiatan sosial. Melalui pelatihan dan pemberdayaan kepada kader-kader yang ada di masyarakat, kemandirian pada kegiatan sosial mulai berkembang dengan keaktifan masyarakat dalam kegiatan kegiatan sosial seperti Posyandu, Forum Lansia sebagai kegiatan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Selain pada kegiatan sosial, kegiatan pemberdayaan juga mencakup terhadap peningkatan ekonomi masyarakat yaitu dilaksanakannya program pelatihan memasak, pelatihan membantik, pelatihan membuat kompos, pelatihan pemberdayaan UMKM yang dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai salah satu peningkatan ekonomi.

Ketiga, Integrasi. LPMK diharuskan mampu mengintegrasikan antara masyarakat dengan program kerja sehingga dapat menjaga hubungan menjadi suatu kesatuan sistem, dengan hal tersebut dapat membantu LPMK dalam melaksanakan program kerja. Proses integrasi yang diamati dilihat dari pelaksanaan program termasuk didalamnya berupa mekanisme perencanaan program, sosialisasi kepada masyarakat, musyawarah, kegiatan bekerja sama dengan unsur unsur masyarakat maupun lembaga yang lain, sampai dengan koordinasi pelaksanaan program kerja yang digunakan sebagai penunjang keberhasilan dan pendekatan yang baik kepada masyarakat agar ketercapaian program dapat terlaksana dan sesuai tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaan integrasi antara masyarakat kurang dilaksanakan dengan baik oleh LPMK. Koordinasi yang dilaksanakan LPMK kepada masyarakat mulai dari sosialisasi program kerja sampai dengan pelaksanaan program kerja belum dilaksanakan oleh LPMK kepada masyarakat. Kurangnya sosialisasi tersebut membuat minimnya pengetahuan masyarakat mengenai program program LPMK. Sehingga masyarakat kurang berpartisipatif dan antusias terhadap pelaksanaan program kerja. Selain itu, proses mekanisme pelaksanaan program kerja mulai dari perencanaan program, sosialisasi sampai dengan pelaksanaan program yang masih belum dilakukan dengan baik. Hal tersebut juga dibuktikan dari hasil wawancara oleh Bapak Sugeng selaku tokoh masyarakat yang mengatakan bahwa koordinasi dari pihak LPMK kepada masyarakat dari mulai sosialisasi sampai dengan koordinasi pelaksanaan program kurang berjalan dengan baik. Kurangnya kegiatan sosialisasi tersebut membuat kurang dimengertinya program program kerja LPMK oleh masyarakat, selain itu koordinasi dari pelaksanaan program kerja hanya dilakukan oleh beberapa perwakilan masyarakat sehingga dari pelaksanaan program kerja tersebut kurang mendapat antusias dari masyarakat.

Pendekatan bottom-up atau sering disebut sebagai pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan perencanaan pembangunan oleh pemerintah bersama dengan lembaga kemasyarakatan yang melibatkan berbagai unsur terkait dalam masyarakat. Menurut Marzuki (2004) terdapat dua ciri penting dalam pendekatan bottom-up dalam pembangunan yaitu : (1) terdapat kemitraan atas dasar kesamaan dari pemerintah dan masyarakat yang diwujudkan dalam fase pengambilan keputusan dan implementasi keputusan program, dan (2) bahwa masyarakat sendiri yang membuat keputusan mereka dan mengambil tanggung jawab penuh dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi dengan dukungan pemerintah.

Implementasi pendekatan bottom-up dalam pelaksanaan program LPMK terhadap peningkatan kesejahteraan yang telah dilaksanakan meliputi perencanaan pembuatan program kerja LPMK yang disusun oleh pemerintah kelurahan melalui forum musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) yang melibatkan unsur masyarakat terkait yaitu LPMK, kelompok kemasyarakatan dan tokoh masyarakat setempat. Menurut Bryanth dan White

(1985) mengemukakan bahwa *bottom-up* dalam perencanaan pembangunan dapat dikatakan efektif karena: (1) dari pendekatan *bottom-up* masyarakat dapat memberi tanggapan, jawaban atau timbal balik pada pemerintah mengenai jawaban, tanggapan, laporan, keluhan dan lainnya, (2) dari pendekatan *bottom-up* masyarakat dapat mengemukakan aspirasi, permintaan atau tuntutannya, (3) dari pendekatan *bottom-up* dapat terjadi proses negoisasi, permufakatan ataupun kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah, (4) dari pendekatan *bottom-up* dapat terjadi proses *exchange* antara masyarakat dengan pemerintah. Penyampaian aspirasi maupun pemberian usulan rencana pembuatan pelaksanaan program kerja yang disampaikan oleh masyarakat kemudian dibahas dan dicatat sebagai usulan pembuatan program. Pengambilan keputusan rencana program kerja dalam forum musyawarah diambil secara demokratis yang mempertimbangkan semua usulan dan aspirasi yang diberikan selama proses musyawarah.

Pendekatan *bottom-up* dalam perencanaan program kerja LPMK di Kelurahan Taman belum mendorong adanya partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan program. Pembuatan program kerja oleh LPMK melalui pertimbangan yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan belum sesuainya program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh LPMK dengan kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat karena terdapat program pemberdayaan yang belum sesuai dengan potensi yang ada pada masyarakat setempat. Program program tersebut juga belum dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai tindak lanjut dari proses pemberdayaan masyarakat sehingga belum mendapat hasil yang optimal. Selain itu, koordinasi antara lembaga-lembaga di kelurahan dengan perencanaan program kerja yang dilaksanakan oleh LPMK masih lemah.

Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan program juga belum sesuai dengan pendekatan *bottom-up* karena pengambilan keputusan perencanaan pelaksanaan program, implementasi dan evaluasi belum dilaksanakan oleh LPMK bersama dengan masyarakat. Masyarakat belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program kerja. Berdasarkan pendekatan *bottom-up* yang telah dijelaskan terdapat beberapa point dalam pelaksanaan yang belum dijalankan dalam mendukung partisipasi masyarakat sebagai indikator utama dalam pendekatan *bottom-up*. Pendekatan *bottom-up* dalam pelaksanaan program kerja LPMK secara baik dan benar akan mendorong masyarakat dalam berpartisipasi, artinya implementasi *bottom-up* yang dilaksanakan secara baik akan semakin mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat melalui proses pemberdayaan. Oleh karena itu LPMK sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah harus berupaya dalam mengimplementasikan pendekatan *bottom-up* dalam pelaksanaan program LPMK.

Pada dasarnya dari semua itu diperlukan adanya kerjasama antara bagian-bagian yang terlibat dalam pelaksanaan program. Program kerja ini akan berjalan dengan maksimal apabila dalam pelaksanaannya mendapat dukungan dari berbagai pihak yaitu pihak pemerintah dalam memberikan bantuan dana operasional yang digunakan untuk pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program, maupun LPMK sebagai lembaga yang mewadahi masyarakat terus mensosialisasikan program kerja yang telah disusun agar program kerja diketahui dan dimengerti masyarakat. Sehingga pada pelaksanaannya timbul partisipasi dan antusias masyarakat sehingga dalam pelaksanaan program kerja lebih efektif. Program kerja ini tidak akan efektif apabila dukungan dukungan dari beberapa bagian tersebut kurang berjalan sesuai dengan tujuannya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan program kerja yang dilaksanakan oleh LPMK mengacu terhadap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat. Pembentukan program kerja juga disesuaikan dengan potensi yang ada di Kelurahan Taman, Kota Madiun. Proses pembentukan program kerja dilaksanakan dengan musyawarah antara masyarakat dengan unsur LPMK maupun pihak Kelurahan dalam proses serap aspirasi sebelum dibentuknya program kerja. Adapun program kerja LPMK di Kelurahan Taman terbagi menjadi tiga bidang, yaitu bidang ekonomi dan pembangunan, bidang pendidikan, pelatihan sosial masyarakat dan kepemudaan dan bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat. Program kerja yang telah dibentuk memfokuskan terhadap pengembangan masyarakat melalui pelatihan dan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa program kerja sudah dilaksanakan oleh LPMK. Pelaksanaan program kerja LPMK kepada masyarakat dapat dikatakan belum efektif. Dari pelaksanaan program kerja kurang adanya partisipasi maupun masyarakat yang aktif dalam pelaksanaan program kerja. Hal tersebut dikarenakan kurangnya koordinasi maupun sosialisasi terhadap program yang telah dibentuk oleh LPMK. Meskipun beberapa kegiatan telah dilaksanakan, masyarakat mengaku bahwa program tersebut belum sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat karena belum dilaksanakan secara konsisten maupun berkelanjutan. Selain itu, dalam pelaksanaan program juga ditemukan hambatan dalam proses pelaksanaannya. Hambatan yang terjadi seperti kurangnya dukungan dana yang dimiliki oleh LPMK dalam pelaksanaan program maupun sumber daya manusia sebagai pelaksana yang mengakibatkan tertundanya kegiatan pelaksanaan.

Sesuai indikator efektivitas dalam pelaksanaan program kerja, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) belum berjalan secara efektif. LPMK belum mampu melaksanakan proses pengintegrasian antara masyarakat dengan lembaga yang lain melalui bentuk kerjasama. Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dari program kerja sampai dengan pelaksanaannya membuat masyarakat kurang berpartisipasi secara keseluruhan dengan baik. Diharapkan kedepannya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dapat memaksimalkan pelaksanaan program kerja dengan bekerja sama dengan berbagai pihak, sehingga dari perencanaan program kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Cahyana Putri. 2021. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Mbay 1 Kecamatan Aeses Kabupaten Nagekeo*. FKIP Undana.
- Abubakar dan Anwar. 2013. “Analisis Karakter dan Kearifan Lokal Dalam Pembelajaran Sosiologi di Kota Banda Aceh”. *Jurnal Komunitas* 5(a)(2013):287-295
- Amelia, Fauza. 2015. “Efektivitas Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.” *JOM FISIP* 2(2):1–8.
- Atthahara, Haura, and Mochamad Faizal Rizki. 2019. “Analisis Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Dampak Kebijakan Pengembangan Kawasan Industri Bagi Masyarakat Sekitar Di Kabupaten Karawang.” *The Indonesian Journal of Politics and Policy*

- (*Ijpp*) 1(1):9–21. doi: 10.35706/ijpp.v1i1.1642.
- Bryant Coralie dan Louise White. 1985. “Manajemen Pembangunan Untuk Negara-Negara Berkembang. Terjemahan. Jakarta. LP3ES.
- Dewanti, Rima Ayu, and Fulia Aji Gustaman. 2021. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pasar Wisata Papringan Di Dusun Ngadiprono Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung.” *Solidarity* 10(1):1–11.
- Kustanto, Heru, Rina Oktaviani, Bonar M. Sinaga, and Muhammad Firdaus. 2012. “Reindustrialisasi Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Makro Serta Kinerja Sektor Industri Di Indonesia.” *Riset Industri* VI(I):97–115.
- Madsen, Susan R. 2012. “Women and Leadership in Higher Education: Current Realities, Challenges, and Future Directions.” *Advances in Developing Human Resources* 14(2):131–39.
- Mardiasmo. 2004. "Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah". Yogyakarta
- Marzuki Muhammad, 2004. "Pendekatan dan Proses Pembangunan Partisipatif". Modul PKM. Jakarta. Departemen Dalam Negeri
- Nugraha, Satya Budi, Wahid Akhsin Budi Nur Sidiq, and Fulia Aji Gustaman. 2018. “Seminar Nasional Kolaborasi Urban Farming Melalui Peningkatan Kapasitas Produksi Di Kota Semarang.” *SNK-PPM* 1:7–10.
- Pratama, Ryan Anggria, and Askarmin Harun. 2017. “Peranan Lembaga Kemasyarakatan Dalam Membantu Tugas Lurah.” *Jurnal Trias Politika* 1(2):55–74. doi: 10.33373/jtp.v1i2.1063.
- Sari, Rini Mustika. 2015. “Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Di Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki.” *JOM FISIP* 2(1):1–8.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi: Kaedah Perilaku Terjemahan Magdalena Jamin*. edited by M. Jamin. Jakarta: Erlangga.

